

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG KEMBAR DESA RAKSABAYA

Oleh :

Eet Saeful Hidayat<sup>1</sup>, R Didi Djadjuli<sup>2</sup>

[esapamungkas85@gmail.com](mailto:esapamungkas85@gmail.com)<sup>1</sup>, [ddjadjuli@gmail.com](mailto:ddjadjuli@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

### ABSTRAK

*Lahirnya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan titik awal kelahiran kembali desa sebagai pioner pembangunan, dimana desa memiliki kewenangan mandiri untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi yang dimilikinya dalam mewujudkan pembangunan masyarakatnya. Sektor pariwisata merupakan salah satu primadona potensi yang banyak dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai salah satu alternatif pendapatan desa yang memiliki dampak luas terhadap penguatan pembangunan sektor lainnya. Curug Kembar sebagai salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, merupakan asset bagi desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Curug Kembar merupakan obyek wisata yang masih perawan, belum ada pembangunan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi suatu obyek wisata. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam melaksanakan kajian ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan peran kelembagaannya. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran pemerintah Desa Raksabaya dalam mengembangkan potensi wisata Curug Kembar sudah on the track, diwujudkan dalam penataan lokasi wisata dengan keragaman fasilitas dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana sendiri. Dalam pengembangan potensi wisata yang menjadi faktor pendukung antara lain daya dukung regulasi, sumber daya alam dan bantuan dari pemerintah. Faktor penghambat, kurangnya daya dukung SDM yang rendah dan rendahnya peran serta perangkat dan masyarakat.*

**Kata kunci :** Peran pemerintah, Pengembangan Objek Wisata, Curug kembar

#### A. PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam mengintegrasikan seluruh unsur-unsur yang ada didalamnya mulai dari sumber daya manusia, sistem, struktur organisasi, teknologi, budaya

organisasi dan lingkungan sehingga memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internalnya ataupun tekanan yang datang dari eksternal. Saat semua potensi organisasi mampu dioptimalkan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, maka

saat itulah akan terjadi perubahan mendasar organisasi yang akan berimplikasi terhadap percepatan meraih keunggulan kompetitifnya yang dicapai secara efektif dan efisien, baik itu organisasi publik ataupun swasta

Kelahiran kembali desa menjadi sebuah angin segar bagi pembangunan kemandirian desa dalam berbagai bidang, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi kesempatan emas bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kondisi objektif desanya dalam rangka mendorong pertumbuhan masyarakat. Kawasan perdesaan disamping itu tersirat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki empat jenis kewenangan yaitu kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provisi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. Ada satu jenis kewenangan lain yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU. Kewenangan tersebut memberikan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa

Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang tengah getol mengembangkan pembangunan yang diawali dengan membidik salah satu potensi alamnya yakni Curug Kembar

yang memiliki potensi keindahan yang belum terpoles secara optimal. Namun keindahan alam ini belum berdampak luas terhadap perubahan ekonomi dan sosial lingkungannya karena sebelumnya belum disentuh dan dikelola baik secara mandiri ataupun formal institusional sehingga potensi ini belum banyak dikenali wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kunjungan wisatawan ke Curug Kembar jika dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan ke wana wisata alam lain yang ada di kabupaten Ciamis

Adapun yang menjadi indikator ketertinggalan Curug Kembar sebagai wana Wisata di kabupaten Ciamisi di antaranya:

1. Belum pernah dikelola secara formal dan tidak adanya inisiator perubahan baik dari pemerintah desa maupun Swadaya masyarakat.
2. Lokasi obyek wisata berada di tanah milik pribadi
3. Akses jalan ke lokasi yang masih sulit ditempuh hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua dan pejalan kaki
4. Medan kelokasi wisata yang curam dan cukup terjal
5. Tidak adanya fasilitas penunjang pariwisata
6. Rendahnya Kesadaran masyarakat
7. Kurangnya daya tarik

Diawali terjadinya pergantian kepemimpinan kepada desa, Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis mulai berbenah untuk mengejar ketertinggalannya dengan membangun desa melalui inventarisasi

potensi wilayah, salah satunya adalah potensi alam, dan Curug Kembar menjadi *pilot project* perubahan pembangunan desa. Potensi pariwisata ini terus dimaksimalkan karena pariwisata mampu menghasilkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Peran Pemerintah desa yang bertumpu kepada sosok kepala desa terpilih yang *visioner* sangat dominan dalam usaha ini karena pada perodesasi kepemimpinan sebelumnya potensi ini terabaikan. Meskipun dalam perjalanan pengembangan banyak menemui hambatan secara internal yakni masih terkendala dengan sikap skeptis dan apatis dari masyarakat juga perangkat desa yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lokasi obyek wisata berada di tanah milik pribadi warga masyarakat sehingga masyarakat menganggap pembangunan obyek tersebut merupakan proyek yang bersifat pribadi. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun obyek tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan semangat perubahan pengembangan potensi wisata ini terus berjalan berjalan bersamaan dengan pengembangan potensi-potensi desa yang lain seperti pemanfaatan asset desa, pembangunan pasar desa, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi lintas sektor.

Kajian ini diharapkan memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan kewilayahan dari pemberdayaan potensi alam dalam rangka menumbuhkembangkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa berbasis alam. Kemandirian desa merefleksikan adanya sistem yang berjalan baik

dibelakangnya dan sistem yang baik terjadi saat organisasi pemerintahan desa berperan besar dalam mengelola seluruh elemen yang ada didalamnya sehingga bergerak sinergis menuju cita-cita yang diharapkan. Peran pemerintah desa disini merupakan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh aparat desa dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena awal kondisi dilapangan dan urgensi peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Peran Pemerintah**

Konsep peran merupakan kata dasar peranan yang dalam *kbbi* adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat; dan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, selaras dengan pendapat Slamet (1985:15), peranan adalah mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Kemudian dipertegas oleh Komarudin (1994:768) yang mengungkapkan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran timbul karena kedudukan seseorang dalam menjalankan perilakunya dan ia tidak bekerja sendiri sebab memiliki lingkungan yang diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan tersebut luas dan beraneka macam serta mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dilakoni secara substansial tidak ada perbedaan. Dengan demikian peranan merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dari setiap perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Begitu pula dalam pandangan Levinson (Soekanto, 2009:231), peranan mencakup 3 hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan Pemerintah menurut Surbakti (Habodin, 2015:3) adalah segala kegiatan atau usaha yang diorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi terciptanya tujuan negara. Pembangunan

daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama *stakeholder* berdasarkan peran dan otoritas masing-masing yang terintegrasi dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang - undang. Sehingga untuk dapat merealisasikan peran dan tanggungjawab tersebut diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki *skill*, *attitude* dan *knoweledge* dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah Desa Raksabaya dapat dikatakan telah melaksanakan perannya apabila telah melakukan fungsi dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Namun dalam penelitian ini pemerintah desa dianggap telah menjalankan perannya apabila telah melakukan tindakan dalam mengelola potensi-potensi desanya. Kemudian Thoha (2012:12) menjelaskan bahwa ada empat bentuk peran yaitu :

- 1) Peran sebagai *entrepreneur*, dalam peranan *enterpreneur* dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bias digarap.
- 2) Peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handle*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggungjawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya.

- 3) Peran sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan.
  - 4) Peran sebagai *negosiator*, peran ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.
- e. Peran sebagai pelaksana sendiri, pembangunan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata alam merupakan bagian integral pemberdayaan kapasitas institusional. Pengembangan objek wisata oleh pemerintah desa meliputi tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun wilayah melalui eksplorasi asset yang dimiliki desa. Arsyad (Subandi 2007;119-120) berpendapat bahwa ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah. Sejalan dengan pemikiran Siagian (2018:142-150) peran pemerintah meliputi :

- a. Peran selaku stabilisator, peran pemerintah dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil.
- b. Peran selaku inovator, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir baru.
- c. Peran selaku modernisator, pemerintah bertugas menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern.
- d. Peran selaku pelopor, pemerintah harus memainkan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan potensi asset desa dipandang sebagai salah satu upaya memperbaiki kinerja organisasi serta memperbaiki pelayanan lembaga terhadap masyarakat. Semua aktivitas tersebut merupakan elemen operatif dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara optimal. Oleh karena itu kebijakan yang berkorelasi dengan pengelolaan asset desa merupakan hal penting yang dirumuskan karena sebagai lembaga pemerintah yang langsung berinteraksi dengan publik tentu dibutuhkan adanya kebijakan yang mengatur tentang bagaimana desa menjalankan fungsi dan perannya tersebut, karena hal ini berkaitan dengan dampak yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Kebijakan tentang penggalian dan pengembangan asset desa pada tahap pelaksanaannya akan menjadi standar pengelolaan yang harus disinergikan oleh kepala desa dalam melakukan aktifitasnya dengan aturan yang berlaku tanpa mengesampingkan peran dan fungsi utama organisasinya. Setiap unit walaupun mempunyai tugas dan sasarannya sendiri namun tidak dapat melepaskan diri dari unit yang lain. Hal tersebut di sebabkan karena 2 (dua) hal:

1. Suatu unit tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu unit yang lain
2. Tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi

unit lain bila seluruh organisasi ingin bergerak lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan. (Iskandar 2015:136).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan peranan adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memegang posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

## 2. Konsep Pemerintah Desa

Sebelum kita membahas Pemerintahan desa perlu dipahami dahulu tentang pengertian desa menurut beberapa sumber.

1. Menurut R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Landis (Bastian 2015:6) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa

- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
  - c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dana mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara. Bastian (2015:79)
  3. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa :
    - a. Desa adalah desa dan atau desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta dengan individu) untuk

memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Salam, 2007 : 34).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut Nurcholis (2005 : 138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pengurusan kepentingan masyarakat ini melekat erat dalam tugas dan fungsi kepala desa sebagai *leader* penyelenggara pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004 : 53).

### 3. Konsep Objek Wisata dan Pariwisata

Objek Wisata merupakan semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang digunakan dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik wisata dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Menurut Adisasmita (2010:43) menyatakan bahwa :

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.

Sedangkan menurut Ridwan (2012:5) pengertian objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Objek wisata merupakan bagian lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai daya tarik sasaran wisata. Objek wisata adalah wujud perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam. Kemudian diperkuat pula oleh Marpaung (2012:78) yang menyatakan bahwa :

Objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang

berhubungan, yang menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*, karena wisata ingin mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya ke suatu obyek wisata.

Lebih lanjut Sammeng (2001:30-33), mengemukakan bahwa obyek wisata dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Obyek wisata alam, seperti laut, gunung, pantai, danau, cagar alam dan lain-lain.
2. Obyek wisata budaya, seperti tari tradisional, musik tradisional, cagar budaya, bangunan sejarah, peninggalan, museum dan lain-lain.
3. Obyek wisata buatan , seperti : taman bermain, taman kota, taman rekreasi dan lain-lain.

Dengan demikian sebuah destinasi wisata menjadi bagian dari konsep pariwisata yang harus memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Menurut Sihite (Hanief dan Permana, 2018 :1) mendefinisikan :

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempat semula dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan berusaha untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau

untuk memenuhi keinginan yang beragam.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya objek daya tarik wisata yang kuat maka potensi ini menjadi magnet untuk menarik para wisatawan Muljadi (2012:89). Pengembangan kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:

1. Atraksi Merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah : a) Keindahan alam. b) Iklim dan cuaca. c) Kebudayaan.

2. Amenitas Merupakan berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut antara lain lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lainlain.
3. Aksesibilitas Berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 2019 : 6) yang mendefinisikan, “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Dengan kata lain,

penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi kewilyahannya di desa Rakasabaya. Dengan fokus penelitian: 1. Peran pemerintah dalam pengembangan Potensi wisata Alam Curug kembar 2. Dampak yang dihasilkan dari adanya pengembangan 3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pengembangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

#### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **1. Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya Kecamatan Cimargas Kabupaten Ciamis.**

Peran pemerintah Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Wisata Curug Kembar menggunakan teori yang dikembangkan oleh Siagian tentang peran pemerintah sebagai berikut:

###### **a. Peran Selaku Stabilisator,**

Peran pemerintah desa masih dilaksanakan secara umum, belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang pengembangan kehidupan masyarakat secara luas seperti menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Pemerintah adalah *stabilisator* yang menjaga stabilitas kehidupan

masyarakat menuju kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang disusun dan ditetapkan bersama *stakeholder* yang bisa dijadikan pedoman mengimplementasikan visi dan misi, program kerja dan aktivitas operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri, contoh pengaktifan kelembagaan peningkatan peran serta masyarakat, Karang Taruna, MUSRENBANGDes serta pembangunan fisik meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia serta upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas. Peran tersebut masih bersipat pasif dimana pemerintah desa lebih cenderung untuk membuka usaha yang belum dilaksanakan masyarakat dalam mengembangkan wilayah ketimbang memperkuat berbagai potensi yang sudah ada.

###### **b. Peran selaku Inovator,**

Pemerintah desa belum secara nyata menjadi *rule model* dalam pembaharuan tata kehidupan

yang bisa dicontoh oleh masyarakat, pada peran ini masyarakat memandang tata kelola pemerintah desa masih standar tidak ada yang bersipat baru baik dalam pelayanan, pola kerja aparat, termasuk adanya upaya-upaya baru dalam meningkatkan taraf ekonomi, kehidupan sosial seperti dilakukannya kegiatan pelatihan UMKM, ekonomi kreatif untuk pemuda, penguatan usaha tradisional pande besi dan ayaman bambu yang menjadi salah *trade mark* produksi kerajinan di Kecamatan Cimaragas kabupaten Ciamis.

- c. **Peran selaku Modernisator,**  
Pemerintah Desa secara implisit memiliki tugas dan tanggungjawab membawa perubahan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang, Kebijakan desa seharusnya menjadi jembatan untuk mengantarkan masyarakat desa menuju tata cara kehidupan modern. Disini pandangan masyarakat bersipat normatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pemerintah desa mengawali dengan adanya membangun *e-governance*, digitalisasi pelayanan, pembangunan kapasitas perangkat desa dan kemampuan mengelola potensi sumber daya desa.

d. **Peran selaku pelopor,**

Pemerintah desa seyogyanya memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang kreatif dan inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada di desa. Disini pemerintah desa belum secara terkonsep rapi menyusun konsep pembangunan desa berbasis kewilyahan yang tetuang dalam program kerja desa seperti dilakukannya investasi pada bidang-bidang yang dapat secara langsung meningkatkan perekonomian. Pemberian bimbingan atau Bimtek kepada UMKM dan sektor informal. Karena dalam padnangan masyarakat peran pemerintah desa harusnya memberikan bantuan teknis dan non teknis kepada masyarakat seperti pelatihan kerja, pemberdayaan karang taruna, peran serta perempuan dalam pembangunan.

- e. **Peran sebagai pelaksana sendiri,** Pembangunan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah dimana pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghambat sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong pembangunan sehingga memberikan dampak yang optimal. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana sendiri berkenaan dengan proses pengembangan potensi wisata alam Curug Kembar cukup baik dari sisi inovasi namun lemah dalam sisi legalitas dan kepercayaan public, dimana proyek ini tidak dimulai dengan membuat *grand strategi* dan rencana kerja desa yang tertuang dalam program kerja desa. Sehingga inovasi pembangunan sarana dan prasarana wisata serta infrastrukturnya belum bisa disinergikan dengan kehendak dan kemampuan masyarakat. Selain itu pengembangan potensi sumber alam ini ditilai oleh masyarakat terlalu dini karena berbagai pertimbangan seperti keterbatasan modal, kemampuan yang belum memadai, sikap skeptis perangkat desa .
2. **Dampak Pengembangan Potensi Wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya Kecamatan Cimargas Kabupaten Ciamis**  
Dampak Pengembangan Potensi Wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya sebagai berikut:
- a. **Segi Sosial**  
Perubahan sosial yang terjadi lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat disebabkan adanya aktivitas penataan lokasi wisata alam Curug Kembar. Dampaknya dapat mengarah *brand awareness* yakni masyarakat mengetahui adanya potensi alam yang bisa dikembangkan dan dikelola, kemudian timbul *sense of belonging* kepada lingkungannya karena masuknya wisatawan lokal dapat menjadi stimulan terhadap daya gerak ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak regress ditunjukkan dengan sikap kebingungan masyarakat untuk berbuat apa dengan adanya kunjungan wisatawan dari luar.
- b. **Segi Ekonomi**  
Paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi adalah dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan. Fenomena perubahan kondisi internal dan eksternal yang tengah berkembang menuntut kebijakan yang akurat

dari para pembuat kebijakan desa dalam upaya pengembangan potensi desa Raksabaya. Pengembangan potensi wisata alam Curug Kembar dijadikan sebagai pioner pembangunan dan menjadikan Objek Wisata Curug Kembar sebagai motor utama penggerak roda ekonomi desa. Saat terjadinya lonjakan kedatangan pengunjung yang masuk ke lokasi wisata Curug Kembar dari segi ekonomi merupakan potensi yang bisa digarap untuk menjangkau pendapatan masyarakat setempat, karena akan menyediakan beragam kesempatan usaha, ketersediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat mengingat banyaknya pendatang yang pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan. Dengan sendirinya tingkat kesejahteraan sosial akan bergerak naik karena memiliki akses terhadap sumber pendapatan baru. Secara substansial tujuan adanya kegiatan pembangunan melalui pengembangan potensi wisata Curug kembar menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatannya.

**c. Segi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau

kekuatan kepada masyarakat karena inti setiap upaya pembangunan yang dilaksanakan adalah terbangunnya kondisi masyarakat yang sejahtera. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. (Sugiri.2012). Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran pengelolaan potensi wilayah berbasis sumber daya lokal yang menjawab tantangan program pembangunan desa, memfasilitasi dan mendorong masyarakat sekitar lokasi agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan yakni menekan tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat di dalam proses pengembangan potensi wisata Curug kembar yang terkait erat dengan peningkatan kemampuan masyarakat sekitar lokasi wisata untuk turut berkontribusi dalam mengelola, memelihara dan mengembangkan demi

perbaikan taraf kehidupannya. Memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memperkuat unsurunsur kebudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Damanik,2019). Dalam melakukan pengembangan potensi wisata Curug kembar ini seyogyanyalah melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional, karena setiap program pengembangan potensi wisata ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pemanfaatan hingga pemeliharaan. Seiring dengan berkembangnya partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

**3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya**

Konstruksi pembangunan kewilayahan akan menemukan akselerasinya saat terjalin kemitraan yang harmonis diantar seluruh elemen masyarakat dengan Pemerintah Desa, apalagi bila menggunakan paradigm baru kolaborasi *Pentahelix* (Ansell dan Gash, 2007) sebagai sebuah proses pembentukan, dan pengaturan suatu organisasi yang lintas sektoral untuk mengatasi masalah publik yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja, melibatkan sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat Desa sedangkan masyarakat akan memperoleh kesempatan berwirausaha dan ketersediaan lapangan kerja sedangkan swasta akan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamnya serta lingkungan yang kondusif. Adapun yang menjadi faktor pendukung, antara lain :

1. Berlakukannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang dan tantangan bagi Desa Raksabaya bisa leluasa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri secara proporsional dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahannya.

2. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten sebagai landasan dalam mengembangkan potensi desa
  3. Pengembangan potensi wisata Curug kembar diproyeksikan untuk menstimulasi masyarakat melalui pengembangan potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Pertimbangan potensi fisik dan potensi non fisik dengan mengedepankan keunggulan Curug Kembar sebagai destinasi wisata baru.
  5. Kewenangan desa dalam alokasi anggaran, merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran pengembangan potensi wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya dapat terealisasi dan sesuai dengan terget penyelesaian
- pasrah, canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pengembangan potensi wisata Curug kembar menjadi lambat
  3. Resonansi program pengembangan yang bias, karena belum adanya kegiatan sosialisasi secara sistematis dari Pemerintah Desa Raksabaya kepada masyarakat. Himbuan pemerintah desa untuk berperan serta tidak direspon secara antusias oleh masyarakat seperti ajakan menyumbang 1000 batang bambu untuk pembuatan fasilitas penunjang wisata tidak berjalan optimal.
  4. Daya dukung infrastruktur yang rendah dimana ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan potensi wisata belum memadai.

**4. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan potensi Wisata Curug Kembar adalah sebagai berikut:**

1. Belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum kegiatan pengembangan ini, sehingga dukungan *stakeholder* tidak maksimal maka proyek pengembangan masih berumpu kepada figur kepala desa
2. Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Raksabaya dimana masih ada masyarakat yang tidak peduli, apatis dengan perubahan lingkungan,

**E. KESIMPULAN**

Didasarkan pada permasalahan yang dihadapi peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi objek wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya Kecamatan Cimargas kabupaten Ciamis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas telah menjalankan perannya dengan baik pada dimensi peran selaku inovator, peran selaku pelopor dan pelaksana pembangunan yang dibuktikan dengan pembangunan dan pengembangan objek wisata Curug Kembar yang terus berjalan sedangkan pada peran selaku stabilisator dan peran selaku moderenisator

masih tergolong rendah karena masih belum adanya kesamaan persepsi dari unsur pemerintahan desa, BPD, LPM, aparatur pemerintah desa dan kontribusi masyarakat

Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas merupakan salah satu Desa di kabupaten Ciamis yang mengalami perkembangan dalam capaiannya menuju desa mandiri melalui penggalan dan pengembangan potensi daerahnya yang diproyeksikan sebagai pioner dalam menciptakan kondisi masyarakat yang peduli dengan lingkungannya. Namun peran pemerintah desa pada kegiatan ini belum memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial, ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah desa sangat dominan sebagai aktor pembangunan yang akan memberikan ruh pada pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakatnya, namun dalam implementasinya turut dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat dalam merealisasikan tujuannya. Ada 4 (empat) faktor yang dapat mendukung pengembangan potensi wisata Curug kembar, yaitu: Regulasi sebagai Payung Hukum yaitu UU desa, Peraturan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Proyeksi pemberdayaan masyarakat, Potensi fisik dan Non fisik sebagai destinasi wisata baru dan Kewenangan dalam alokasi anggaran desa. Adapun yang menjadi penghambat proses pengembangan potensi wisata Curug Kembar ada 4 (empat) faktor, yaitu: Belum adanya regulasi berbentuk PERDES, Partisipasi masyarakat, Persepsi yang terbentuk di masyarakat dan Daya dukung infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo.2010, *Pembangunan Kawasan dan tata Ruang*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- A.J, Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Ansell,Cris & Alison Gash,2007. *Collaborative Governance in Theory and Pactice. Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bastian, Indra, 2015, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta, Erlangga
- Bintarto,R. *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. (2014), dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>.(di akses 15 Juni 2020).
- <https://kbbi.web.id/peran> .(diakses 15 Juni 2020).
- Damanik, Adlin, 2019. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah*. Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Volume 1 Nomor 2 Juni 2019, h. 171-186
- Hanief, Shofwan dan Dian Pramana,2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan. Media Sistem Informasi*. Yogyakarta
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Jurnal

- Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalaleksektif/article/viewFile/16191/15695>
- Iskandar, Jusman (2015). *Manajemen Publik*. Cet ke-16, Puspaga. Bandung.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiri Lasiman, 2012, .Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal.ubl.ac.id  
<https://media.neliti.com/media/publications/220751-peranan-pemerintah-daerah-dalam-pemberda.pdf>
- Marpaung, H dan Bahar, Herman (2002) *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabeta
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 20019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Salam, Dharma Setyawan, 2007, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta.Djambatan
- Sammeng, Andi M. 2001, *Cakrawala Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Administrasi Pembangunan. Konsep, dimensi dan Strateginya*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Jakarta, Rajawali pers
- Slamet, Margono. 1985 *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, CV. Rajawal.
- Subandi. 2007.*Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sadu Wasistiono, dkk, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia
- Ridwan,Mohamad. (2012), *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Sofmedia
- Rivai, Veihltzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata  
<https://www.kemenparekraf.go.id/index.php/categories/undang-undang>
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  
<https://www.bpkp.go.id>